

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Teori keagenan yang dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976) didasarkan pada hubungan kontrak antara prinsipal dan agen. Prinsipal merupakan pihak yang memiliki sumber daya dan memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk mengelola sumber daya. Agen berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanahkan oleh prinsipal kepadanya serta memiliki kewenangan pengambilan keputusan yang akan memengaruhi kesejahteraan prinsipal. Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*). Menurut Scott (2015), *agency theory* merupakan hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*, *principal* adalah pihak yang mempekerjakan *agent* agar melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, sedangkan *agent* adalah pihak yang menjalankan kepentingan *principal*. *Agency theory* merupakan suatu kontak *principal*, termasuk di dalamnya pelimpahan kekuasaan dari *principal* kepada *agent*.

Prudence concept dapat dijelaskan dari perspektif teori keagenan. Teori tersebut menyatakan perusahaan merupakan *nexus of contract* yakni tempat bertemunya kontrak antar berbagai pihak yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Konflik tersebut tercermin dari kebijakan dividen, pendanaan, dan kebijakan investasi (Purwati, 2009). Kebijakan tersebut dapat digunakan oleh

investor untuk mengatur manajer dan memindahkan keuntungan dari kekayaan kreditor. Upaya investor tersebut akan menjadi lebih sulit dengan adanya laporan keuangan yang bersifat *prudence*.

Prudence concept dalam akuntansi akan mendukung terciptanya kontrak yang efisien antara berbagai pihak, khususnya pihak investor dan kreditor sebagai pengguna utama laporan keuangan (Juanda, 2007). Selain itu, menurut pandangan teori keagenan bahwa terdapat pemisahan antara pihak *agent* dan *principal* yang mengakibatkan munculnya potensi konflik dapat memengaruhi kondisi keuangan perusahaan dengan demikian diperlukan suatu pengendalian yang dapat menyejajarkan perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak. Penerapan *corporate governance* bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, sehingga tidak terjadi konflik antara pihak *agent* dan *principal* yang berdampak pada penurunan *agency cost*.

Good Corporate Governance merupakan mekanisme yang efektif digunakan untuk meminimalisasi munculnya *agency conflict*, juga digunakan untuk meningkatkan ekonomi yang efisien. GCG merupakan suatu konsep yang merujuk *agency theory* yang diharapkan mampu digunakan untuk memberikan keyakinan pada pihak investor bahwa mereka akan menerima pengembalian atas dana yang sudah diinvestasikan (Agustia, 2013).

2.2 Teori Akuntansi Positif

Teori akuntansi positif pertama kali dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman (1978), teori akuntansi positif merupakan pengembangan dari teori

akuntansi normatif yang siap dipakai dalam praktik sehari-hari. *Positive Accounting Theory* menurut Belkaoui (2007), masalah utama yang terjadi yaitu merubah nilai-nilai pada akun arus kas dengan cara menerapkan prosedur akuntansi sesuai kebutuhan. Dalam hal ini terdapat tiga cara untuk mengetahui manajer suatu perusahaan menerapkan akuntansi yang konservatif yaitu hipotesis *bonus plan*, hipotesis *debt covenant* serta hipotesis *political cost*. Menurut Belkaoui (2007), hipotesis *bonus plan* menjelaskan bahwa pihak manajemen menggunakan prosedur akuntansi dengan meningkatkan laba di tahun berikutnya guna mendapatkan bonus atas kinerjanya. Tindakan tersebut berdampak pada tingkat *prudence* akan laba menjadi rendah.

Tingkat konservatisme dalam pelaporan laba berdasarkan *debt covenant hypothesis* dapat dijelaskan dengan *debt/equity hypothesis* yang merupakan pembatasan dari *debt covenant* karena perusahaan cenderung tidak konservatif dengan memiliki nilai laba yang lebih tinggi yang membuat rasio *leverage* nya juga semakin tinggi. Jika perusahaan memperoleh pinjaman yang semakin tinggi, maka perusahaan berupaya menunjukkan kinerja yang baik sehingga pihak kreditur yakin jika perusahaan dapat melunasi utangnya.

Dalam *political cost hypothesis* kemungkinan hanya perusahaan besar dan bukan perusahaan kecil yang akan memilih akuntansi untuk menurunkan laba yang membuat perusahaan besar cenderung lebih sensitif terhadap biaya politik (Belkaoui, 2007). Biaya politik dapat terjadi karena adanya konflik kepentingan antara pihak manajemen dengan elit politik seperti pemerintah dan anggota partai dimana perusahaan turut serta dalam pertanggung jawaban kepentingan sosial di

masyarakat. Hal yang tercermin adalah pembayaran pajak, semakin besar laba yang di dapatkan oleh perusahaan otomatis pajak yang dibayarkan juga semakin besar. Dengan demikian perusahaan berlomba-lomba untuk mengurangi pajaknya dengan melakukan tindakan konservatif atas pelaporan keuangannya.

2.3 Prudence concept

Pada dasarnya akuntansi merupakan suatu proses untuk menyediakan informasi keuangan suatu organisasi mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan yang dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Penyajian informasi keuangan tersebut harus memiliki syarat kehati-hatian dalam mengukur aktiva dan laba karena aktivitas bisnis dilingkupi suatu ketidakpastian. Sehingga, pada prinsipnya *prudence* akuntansi diimplementasikan dalam keadaan jika terdapat sesuatu peningkatan aktiva yang belum terealisasi, maka kejadian itu belum bisa diakui. Namun, mengakui adanya penurunan aktiva walaupun kejadian tersebut belum terealisasi. Konservatisme sebagai reaksi yang hati-hati (*prudent reaction*) dalam menghadapi ketidakpastian yang melekat pada perusahaan untuk memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko dalam lingkungan bisnis sudah cukup dipertimbangkan dengan baik (Budiharta, 2013).

Standar akuntansi yang ada di Indonesia yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang sebelumnya berkiblat pada *Generally Accepted Accounting Principles* (GAAP), telah dikonvergensi ke dalam IFRS (*International Financial Reporting Standard*) karena Ikatan Akuntan Indonesia

(IAI) telah mencanangkan program konvergensi PSAK ke IFRS pada Desember 2007 (Yustina, 2013). Penerapan ini dimaksudkan agar daya informasi laporan keuangan dapat meningkat semakin lebih baik sehingga laporan keuangan dapat lebih mudah dipahami dan mudah digunakan bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkannya. Selain itu, konvergensi IFRS juga bertujuan agar dapat menghasilkan laporan keuangan yang memiliki akuntabilitas tinggi dan menghasilkan laporan keuangan yang relevan dan akurat. Dengan konvergensi IFRS diharapkan tidak diperlukannya lagi rekonsiliasi antara laporan keuangan menurut PSAK dengan laporan keuangan menurut IFRS.

Salah satu manfaat konvergensi adalah sebagai daya tarik minat investor, dengan adanya transparansi dan kemudahan dalam memahami laporan keuangan yang telah memakai standar yang berlaku secara internasional. Hal ini sejalan dengan kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota G20. Sejak tahun 2010, prinsip konservatisme akuntansi sudah tidak lagi digunakan. IFRS telah memperkenalkan prinsip baru yaitu *prudence* yang menggunakan *current value* sebagai indikator pengukuran laporan keuangan yang dapat dimengerti, relevan, dan dapat diandalkan sebanding sebagai pengganti prinsip konservatisme. *Prudence* yang dimaksudkan dalam IFRS berkaitan dengan adanya *revenue recognition* yaitu pendapatan dapat diakui walaupun dalam bentuk potensi, selama memenuhi ketentuan dari pengakuan pendapatan (*revenue recognition*) dalam IFRS (Yustina, 2013).

Didalam kerangka *International Accounting Standards Boards* (IASB) paragraph 37 menyatakan *prudence* merupakan tingkat kehati-hatian dalam

pelaksanaan penilaian yang dibutuhkan untuk membuat estimasi ketika adanya ketidakpastian, sehingga asset atau pendapatan tidak berlebihan dan kewajiban atau beban disajikan secara wajar. Cara melihat kehati-hatian adalah dengan hanya mencatat transaksi pendapatan atau aset jika sudah pasti, dan mencatat transaksi atau kewajiban bila memungkinkan. Aspek lain dari konsep kehati-hatian adalah bahwa kecenderungan menunda pengakuan atas transaksi pendapatan atau aset sampai yakin akan hal itu, sementara kecenderungan mencatat biaya dan kewajiban sekaligus, selama hal itu mungkin terjadi. Juga, secara teratur meninjau aset untuk melihat apakah nilainya menurun, dan kewajiban untuk melihat apakah jumlahnya meningkat (Meilany, 2020).

Singkatnya, kecenderungan dalam konsep kehati-hatian adalah untuk tidak mengenali keuntungan atau setidaknya menunda pengakuan mereka sampai transaksi yang mendasarinya lebih pasti. Kehati-hatian biasanya dilakukan dalam pengaturan, misalnya penyisihan piutang ragu-ragu atau cadangan persediaan yang tidak terpakai. Dalam kedua kasus tersebut, barang tertentu yang akan menyebabkan biaya belum teridentifikasi, namun orang yang bijaksana akan mencatat cadangan untuk mengantisipasi jumlah yang wajar dari biaya-biaya ini yang timbul di beberapa titik di masa depan (Meilany, 2020).

2.4 Nilai ekuitas perusahaan

Dalam kerangka dasar Standar akuntansi menurut Ikatan Akuntan Indonesia mendefinisi ekuitas sebagai berikut (pasal 49) ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Pada dasarnya ekuitas

berasal dari investasi pemilik dan hasil usaha perusahaan. Ekuitas akan berkurang dengan adanya penarikan kembali penyertaan oleh pemilik, pembagian keuntungan (dividen) atau kerugian usaha. Penilaian perusahaan merupakan tujuan penting bagi banyak pengguna laporan keuangan

Sedangkan menurut Soewardjono (2005), Ekuitas didefinisikan sebagai hak residual atas aktiva bersih untuk menunjukkan bahwa ekuitas bukan kewajiban. Ini berarti ekuitas bukan pengorbanan sumber ekonomi masa datang. Karena definisi atas dasar aset dan kewajiban, nilai ekuitas juga bergantung pada bagaimana aset dan kewajiban diukur. Dalam kondisi ketidakpastian, kreditor secara historis mendasarkan keputusannya pada nilai konversi aset yang terendah sehingga penyajian aset dalam neraca juga mengikuti konsep ini.

Konservatisme atau *prudence* dalam penilaian aset memunyai implementasi penentuan laba dalam *statement* laba-rugi. Dengan menurunkan nilai aset (khususnya persediaan barang) pada akhir periode akibat turunnya harga atau selera, laba bersih akan menjadi lebih kecil dan secara tidak langsung akan memengaruhi nilai ekuitas para investor (Soewardjono, 2005).

Wahyudi & Pawestri (2006) yang dikutip dari Wijaya, *et al.*, (2010) mengungkapkan bahwa tujuan jangka panjang suatu perusahaan adalah pengoptimalan nilai perusahaan. Nilai perusahaan akan terefleksi dari harga saham di pasar modal. Harga saham merupakan *fair price* yang dijadikan proksi nilai perusahaan. Nilai buku perusahaan dari ekuitasnya juga merupakan cerminan dari nilai perusahaan (Pertiwi, 2010). Ekuitas yang ada dalam neraca keuangan adalah

alat yang menggambarkan total keseluruhan modal perusahaan yang dapat digunakan dalam menilai suatu perusahaan.

2.5 Good corporate governance

Sutedi (2011) menjelaskan bahwa Indonesia mulai menerapkan prinsip *good corporate governance* ditandai sejak Indonesia menandatangani *letter of intent* (LOI) dengan *International Monetary Fund* (IMF), yang salah satu bagian terpenting adalah pencantuman jadwal perbaikan pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia, sejalan dengan hal tersebut, Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) berpendapat bahwa perusahaan di Indonesia memiliki tanggung jawab standart *good corporate governance* yang telah ditetapkan di tingkat internasional.

Pada tahun 1970 istilah *corporate governance* pertama kali digunakan ketika terdapat beberapa skandal korporasi yang terjadi di Amerika Serikat dan beberapa tindakan perusahaan perusahaan di Amerika Serikat yang terlibat dalam kegiatan politik yang tidak sehat dan terjadinya beberapa korupsi, skandal keuangan dan krisis ekonomi yang terjadi di berbagai perusahaan memusatkan untuk menggunakan dan menerapkan *corporate governance*. Dalam konteks *corporate governance* diasosiasikan dengan kewajiban direksi kepada perusahaan untuk menjamin bahwa dirinya memenuhi semua kewajiban sesuai yang dibebankan kepadanya sehingga menjamin bahwa kegiatan bisnis perusahaan tersebut akan dilaksanakan hanya demi kepentingan perusahaan (Rachmawati, 2018).

Tunggal (2012) menyatakan bahwa *good corporate governance* adalah sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders*, karyawan dan masyarakat sekitar. Florensia (2014), menjelaskan bahwa mekanisme yang dapat mengendalikan perilaku manajemen atau sering disebut mekanisme *corporate governance* dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. yaitu mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal, mekanisme ini berhubungan langsung dengan proses pengambilan keputusan, seperti dewan komisaris, dewan direksi, komite audit, komisaris independen. Sedangkan mekanisme eksternal adalah cara memengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal, Mekanisme eksternal dijelaskan melalui *outsiders*. Hal ini termasuk pemegang saham institusional. Berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu dalam penelitian ini menggunakan mekanisme internal dengan menggunakan indikator ukuran dewan komisaris, komisaris independent dan komite audit.

2.5.1 Variabel *Good Corporate Governance*

Menurut KNKG (2021), dalam *Good Corporate Governance* ada enam prinsip yang harus diterapkan oleh perusahaan, yaitu *transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi* serta kewajaran atau kesetaraan, dan stabilitas politik. Penguatan tata kelola di sektor publik maupun korporasi merupakan hal yang penting dalam situasi saat ini. Situasi tersebut mendorong diperbarunya mandat KNKG melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

(Kepmenko) Nomor 44 Tahun 2021 tentang Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG), penerapan prinsip-prinsip tata kelola perlu diperkuat untuk meningkatkan capaian pada indikator stabilitas politik dan keamanan, serta korupsi. Keenam prinsip tersebut diperlukan untuk membantu perusahaan agar tercapai tujuannya terutama dalam mendorong upaya pemerintah dalam menangani Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan keenam prinsip tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. *Transparansi (Transparency)*

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya.

2. *Akuntabilitas (Accountability)*

Terkait dengan prinsip akuntabilitas, perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur, dan sesuai kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibilitas (Responsibility)*

Untuk prinsip responsibilitas atau prinsip tanggung jawab, perusahaan harus mematuhi peraturan perundangundangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat menjalankan perusahaan dalam jangka panjang serta mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus bisa memperhatikan kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

6. Stabilitas Politik

Prinsip-prinsip governansi perlu diperkuat untuk meningkatkan capaian pada indikator stabilitas politik dan keamanan serta korupsi. Peningkatan kasus korupsi yang melibatkan sektor publik dan privat dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa etika dan governansi perlu diperkuat. Penguatan pemberantasan korupsi secara khusus dan governansi secara umum, diperlukan untuk mendorong peningkatan kinerja perekonomian nasional Selain itu, peningkatan kinerja perekonomian nasional juga perlu diakselerasi demi mendorong pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi COVID-19. Peran lembaga governansi berskala nasional diperlukan sebagai *prime mover* dalam mengatasi pelemahan indikator korupsi.

2.5.2 Indikator *Good Corporate Governance*

Jumlah dewan komisaris dalam hal ini juga dapat menggambarkan seberapa besar struktur pengelolaan dewan komisaris yang terdapat dalam perusahaan. Ukuran dewan komisaris diukur berdasarkan jumlah anggota yang ada dalam jajaran dewan komisaris. Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Corporate Governance*.

Komite Audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Florensia (2014) menyatakan bahwa komite audit bertugas memastikan penerapan prinsip-prinsip akuntansi dalam menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan berkualitas. Penggunaan prinsip *prudence* yang lebih tinggi dalam proses pelaporan keuangan akan dipengaruhi dengan keberadaan komite audit. Akhirnya, kualitas hasil pelaporan keuangan perusahaan akan meningkat dengan penerapan prinsip *prudence reaction*.

Komisaris independen berfungsi sebagai kekuatan dan penyeimbang (*conterveiling power*) dalam pengambilan keputusan oleh dewan komisaris. Komite Nasional *Good Corporate Governance* (KNGCG) mengeluarkan pedoman tentang komisaris independen yang ada di perusahaan publik. Pedoman tersebut

menyebutkan bahwa pada prinsipnya, komisaris bertanggungjawab dan berwenang untuk mengawasi kebijakandan tindakan direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi, jika diperlukan. Untuk membantu komisaris dalam menjalankan tugasnya, berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan, maka seorang komisaris dapat meminta nasihat kepada pihak ketiga dan atau membentuk komite khusus. Setiap anggota komisaris harus berwatak amanah serta mempunyai pengalaman dan kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya. *Corporate Governance* yang baik dibangun dengan adanya dewan komisaris yang kredibel dan independen.

Florensia (2014) menjelaskan bahwa perusahaan yang tercatat dalam bursa efek wajib mempunyai komisaris independen. Jumlah proporsional dari komisaris independen harus sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali. Jumlah anggota komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris. Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *Corporate Governance*.

Tabel 1. Indikator *Good Corporate Governance*

No	Pilar	Indikator
1	<i>Transparency</i>	1. Waktu penerbitan laporan keuangan 2. Visi perusahaan 3. Misi perusahaan 4. Sasaran perusahaan 5. Strategi perusahaan 6. Kondisi keuangan 7. Susunan pengurus 8. Kompensasi pengurus 9. Pemegang saham pengendali 10. Target perusahaan 11. Capaian periode 12. Keterbukaan antar divisi 13. Kesesuaian data
2	Accountability	Jumlah anggota komite audit paling kurang 3 (tiga) dan paling banyak sama dengan jumlah anggota direksi.
3	<i>Responsibility</i>	1. Prinsip kehati-hatian . 2. Melaksanakan tanggung jawab sosial. 3. <i>Social Responsibility</i>
4	Independency	1. Diadakannya RUPS 2. RUPS minimal 1 (satu) kali dalam satu periode.
5	<i>Fairness</i>	Keberadaan dewan komisaris serta ikut serta peran komisaris independen
6	<i>Stabilitas Politik</i>	Indeks Demokrasi Indonesia

Sumber: Pedoman Umum *Corporate Governance Indonesia* (KNKG, 2021)

Dari beberapa penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Good corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi pengendalian usaha untuk keberhasilan usaha perusahaan sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders* serta mengatur hubungan dan tanggung jawab antara karyawan, kreditur serta para pemegang kepentingan *internal* dan *eksternal* dalam mengendalikan perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan yang ingin dicapai oleh para pihak-pihak yang berkepentingan dan memperhatikan kepentingan para *stakeholder* sesuai dengan aturan dan undang-undang.

2.6 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan pengaruh *prudence concept* terhadap nilai ekuitas perusahaan dengan *good corporate* sebagai moderasi adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

NO	Nama	Variabel	Hasil Penelitian
1	Yenti & Syofyan (2013)	<p><u>Variabel Penelitian:</u> Y: Nilai Perusahaan X; Konservatisme M: <i>Good corporate governance</i></p> <p><u>Metode analisis :</u> Regresi Linear Berganda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konservatisme tidak berpengaruh signifikan positif terhadap penilaian ekuitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI 2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap hubungan konservatisme akuntansi dengan penilaian ekuitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 3. Jumlah Dewan Komisaris memperkuat hubungan konservatisme akuntansi dengan penilaian ekuitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

(Dilanjutkan...)

(...lanjutan)

No	Nama	Variabel	Hasil Penelitian
2	Florensia (2014)	<p><u>Variabel Penelitian:</u> Y: Penilaian ekuitas perusahaan X: Konservatisme M: <i>Good Corporate Governance</i></p> <p><u>Metode analisis :</u> Regresi Linear Berganda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel konservatisme tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan pada laporan tahunan perusahaan retail trade. 2. Variabel ukuran dewan komisaris, komisaris independen dan kualitas audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan. 3. Pemoderasi <i>good corporate governance</i> tidak berpengaruh terhadap hubungan konservatisme akuntansi dengan nilai perusahaan.
3	Anthonius (2016)	<p><u>Variabel Penelitian:</u> Y: Nilai ekuitas perusahaan X; Konservatisme M: <i>Good corporate governance</i></p> <p><u>Metode analisis :</u> Regresi Linear Berganda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konservatisme Akuntansi Berpengaruh Positif Terhadap Penilaian Ekuitas Perusahaan. 2. Kepemilikan Manajerial Tidak Berpengaruh Terhadap Hubungan Antara Konservatisme Akuntansi Dengan Nilai Perusahaan. 3. Jumlah Komisaris Berpengaruh Positif Terhadap Hubungan Antara Konservatisme Akuntansi Dengan Nilai Perusahaan
4	Augustine (2017)	<p><u>Variabel Penelitian:</u> Y: Nilai Perusahaan X; Konservatisme M: <i>Good corporate governance</i></p> <p><u>Metode analisis :</u> Regresi Linear Berganda</p> <p><u>Metode Analisis:</u> Regresi Linear Berganda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel konservatisme akuntansi berpengaruh negatif terhadap variabel nilai perusahaan. 2. <i>Good corporate governance</i> yang diproksikan dengan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap hubungan konservatisme dengan nilai perusahaan. 3. <i>Good corporate governance</i> yang diproksikan dengan komite audit tidak berpengaruh terhadap konservatisme akuntansi dengan nilai perusahaan.

(Dilanjutkan...)

(...lanjutan)

No	Nama	Variabel	Hasil Penelitian
5	Sriyani (2017)	<u>Variabel Penelitian:</u> Y : Nilai perusahaan X1: Konservatisme akuntansi M1: Komite audit M2: Kepemilikan Institusional <u>Metode analisis :</u> Regresi Linear Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 2. Komite audit berpengaruh positif terhadap hubungan konservatisme akuntansi dengan nilai perusahaan. 3. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap hubungan konservatisme akuntansi dengan nilai perusahaan.
6	Basuki & Indra (2018)	<u>Variabel Penelitian:</u> Y: Nilai perusahaan X1: <i>Good corporate governance</i> X2: <i>Prudent akuntansi</i> <u>Metode Analisis:</u> Regresi Linear Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 2. kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 3. ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
7	Maslichah & Mawardi (2018)	<u>Variabel Penelitian:</u> Y: Penilaian ekuitas perusahaan X: Konservatisme M: <i>Good Corporate Governance</i> <u>Metode analisis :</u> Regresi Linear Berganda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konservatisme akuntansi berdampak positif signifikan pada penilaian ekuitas perusahaan. 2. Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap hubungan konservatisme dan penilaian ekuitas perusahaan. 3. Jumlah dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap hubungan konservatisme dan penilaian ekuitas perusahaan. Perencanaan pajak dengan <i>profitabilitas</i> sebagai pemoderasi tidak dapat memengaruhi nilai perusahaan.

(Dilanjutkan...)

(...lanjutan)

No	Nama	Variabel	Hasil Penelitian
8	Rosharlianti (2018)	<p><u>Variabel Penelitian:</u> Y: Nilai perusahaan X1: <i>Prudence</i> X2: <i>Family ownership</i> Z: Kebijakan dividen</p> <p><u>Metode analisis :</u> Regresi Linear Berganda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa <i>prudence</i> dan <i>family ownership</i> secara simultan berpengaruh terhadap kebijakan dividen. 2. <i>prudence</i> tidak berpengaruh secara positif terhadap kebijakan dividen sehingga H2 ditolak. 3. Variabel <i>family ownership</i> diuji secara parsial berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen sehingga H3 diterima. 4. <i>Prudence</i> dan <i>family ownership</i> secara simultan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 5. <i>Prudence</i> berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan 6. <i>Family ownership</i> tidak berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan 7. Kebijakan dividen berpengaruh positif terhadap Nilai Perusahaan.
9	Ariyanti (2019)	<p><u>Variabel Penelitian:</u> Y: <i>Equity valuation</i> X1: Konservatisme Akuntansi X2: <i>Stock Return</i> M: <i>Good corporate governance</i></p> <p><u>Metode Analisis:</u> Regresi Linear Berganda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konservatisme akuntansi berpengaruh positif terhadap penilaian ekuitas perusahaan. 2. Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap hubungan antara konservatisme akuntansi dengan nilai perusahaan. 3. Jumlah komisaris berpengaruh positif terhadap hubungan antara konservatisme akuntansi dengan nilai perusahaan.

(Dilanjutkan...)

(...lanjutan)

No			
10	Nancy (2019)	<u>Variabel Penelitian:</u> Y: Penilaian ekuitas perusahaan X: Konservatisme akuntansi M: Kepemilikan Manajerial <u>Metode analisis :</u> Regresi Linear Berganda	1. Konservatisme akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penilaian ekuitas. 2. Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan dan tidak mampu memperkuat hubungan konservatisme akuntansi terhadap penilaian ekuitas.
11	Meilany (2020)	<u>Variabel Penelitian:</u> Y: Nilai perusahaan X1: <i>Prudence</i> X2: Perencanaan Pajak M: <i>Profitabilitas</i> <u>Metode analisis :</u> Regresi Linear Berganda	1. <i>Prudence</i> berpengaruh signifikan negatif terhadap Nilai Perusahaan. 2. Perencanaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap nilai perusahaan. 3. <i>Prudence</i> semakin menurunkan nilai perusahaan pada saat profitabilitas (ROA) tinggi 4. Perencanaan pajak dengan <i>profitabilitas</i> sebagai pemoderasi tidak dapat memengaruhi nilai perusahaan.

Sumber : Data Diolah 2021

2.7 Urgensi Penelitian

Penelitian ini merupakan modifikasi dari penelitian Anthonius (2016). Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pembaharuan tahun dalam melakukan penelitian. Penelitian saat ini menggunakan tahun yang lebih terbaru yaitu tahun 2017--2019. Serta dalam penelitian ini variabel Moderasi yang digunakan yakni ukuran dewan komisaris, komisaris independen dan komite audit sebagai mekanisme internal spesifik perusahaan karena supaya dapat lebih menggambarkan keterkaitan antar variabel. Dalam

konsep *good corporate governance*, struktur fungsi dan tugas dari masing-masing pelaku organisasi bisnis modern akan memengaruhi nilai perusahaan (*value of the firm*). Tjhen, *et al.*, (2012) menjelaskan bahwa saat fungsi dan tugas tersebut dipisah dalam bentuk *Board of Directors dan Board of Commisioner*, maka nilai perusahaan akan menjadi maksimal. Jadi, variabel moderasi yang akan dimasukkan dalam penelitian ini hanya sebatas mekanisme internal spesifik perusahaan, dengan indikator ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit.

2.8 Hipotesis Penelitian

1. Pengaruh *Prudence Concept* terhadap Nilai Ekuitas Perusahaan

Menurut hasil penelitian Tjhen, *et al.*, (2012) mekanisme *prudence* akuntansi berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil tersebut tidak jauh berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Fala (2007). Penelitian oleh Sriyani (2017) juga menyatakan bahwa *prudence* akuntansi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Sejalan dengan penelitian Wahyuningsih & Riduwan (2014) juga menyatakan bahwa *prudence* akuntansi dan komite audit berpengaruh positif terhadap nilai ekuitas perusahaan. *Prudence concept* terbukti menghasilkan laba yang lebih berkualitas dengan meminimalisir tindakan membesarkan laba sehingga mampu meningkatkan nilai perusahaan. Hipotesis pertama yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₁: *Prudence concept* berpengaruh positif terhadap nilai ekuitas perusahaan.

2. Pengaruh Komite Audit dalam memperkuat pengaruh *Prudence Concept* terhadap Nilai Ekuitas Perusahaan

Menurut Wardhani (2008) keberadaan komite audit memperkuat pengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat *prudence* terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan ukuran akrual. Hasil ini menunjukkan bahwa dengan adanya komite audit dalam suatu perusahaan, maka proses pelaporan keuangan perusahaan akan termonitor dengan baik. Komite audit ini akan memastikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang akan menghasilkan informasi keuangan perusahaan yang akurat dan berkualitas melalui penggunaan prinsip *prudence concept* yang lebih tinggi dalam proses pelaporan keuangan perusahaan. Hipotesis kedua yang akan diuji dalam penelitian ini sebagai berikut.

H₂: Jumlah anggota komite audit memperkuat pengaruh *prudence concept* terhadap nilai ekuitas perusahaan.

3. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris dalam memperkuat pengaruh *Prudence Concept* terhadap Nilai Ekuitas Perusahaan

Ukuran dewan komisaris merupakan elemen penting dari karakteristik dewan komisaris yang memengaruhi tingkat konservatisme akuntansi. Penelitian Lara, *et al.*, (2005) dalam (Fala, 2007) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki dewan yang kuat sebagai mekanisme *corporate governance* menggambarkan tingkat konservatisme yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan dewan yang lemah. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan (Hasporo, 2006) bahwa dewan komisaris merupakan “*the ultimate center of control.*” Semakin besar jumlah komisaris, fungsi *service* dan *control* akan semakin baik karena akan semakin banyak keahlian dalam memberikan nasehat yang bernilai dalam strategi dan penyelenggaraan perusahaan.

Fungsi *service* dan *control* dewan komisaris sebagai mekanisme *corporate governance* ini dapat dilihat sebagai suatu sinyal kepada para investor bahwa perusahaan telah dikelola sebagaimana mestinya (sinyal positif). Investor diharapkan akan menerima sinyal ini dan bersedia membayar premium yang lebih tinggi untuk perusahaan yang *well-governed* di Indonesia. Dengan demikian, penerapan *good corporate governance* berhubungan positif dengan kinerja perusahaan di mata investor (Kusumawati, 2005).

Penelitian yang dilakukan oleh Tjen (2006) menunjukkan bahwa Komisaris independen berpengaruh secara positif terhadap hubungan antara konservatisme akuntansi dengan nilai perusahaan. Penelitian dari Purwati (2009) juga menunjukkan hasil yang serupa bahwa jumlah komisaris independen berpengaruh positif terhadap hubungan antara konservatisme akuntansi dengan nilai perusahaan. Penelitian dari Yenti & Syofyan (2011) juga menunjukkan hasil yang serupa bahwa jumlah dewan komisaris merupakan variabel pemoderasi atau memperkuat hubungan konservatisme akuntansi dengan penilaian ekuitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa efek Indonesia. Hipotesis ketiga yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₃: Proporsi dewan komisaris memperkuat pengaruh *prudence concept* terhadap nilai ekuitas perusahaan.

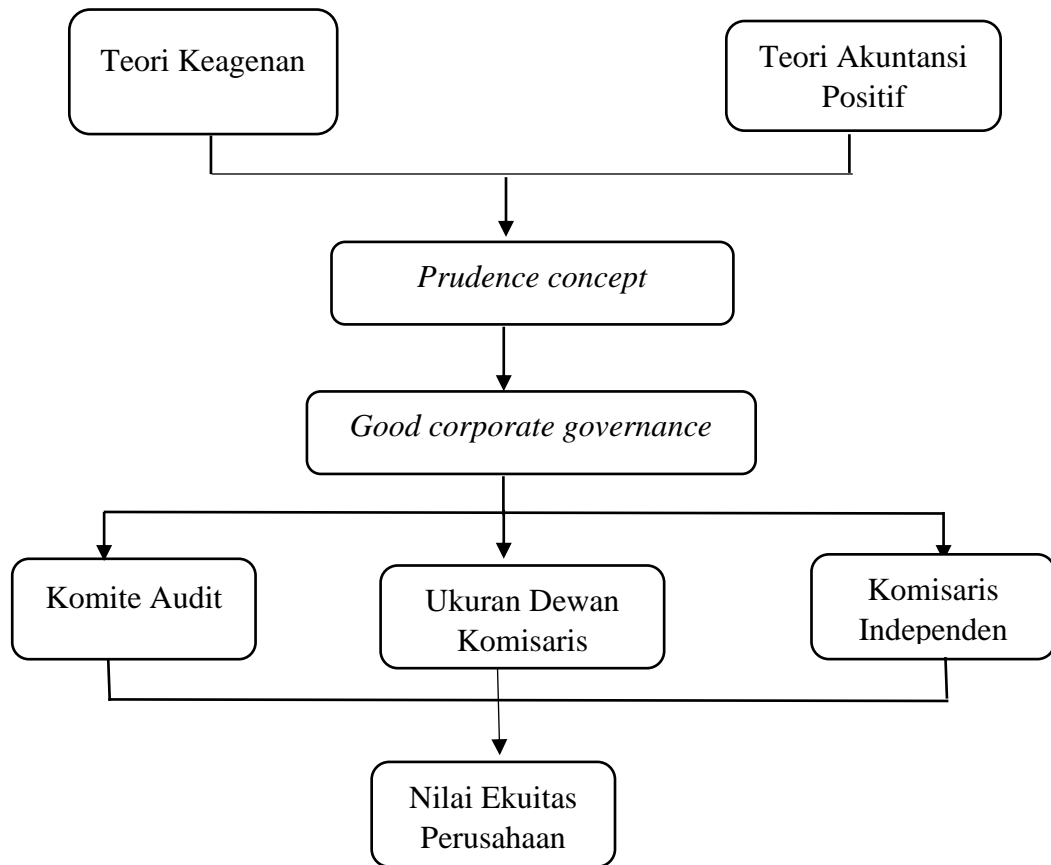
4. Pengaruh Komisaris Independen dalam memperkuat pengaruh *Prudence Concept* terhadap Nilai Ekuitas Perusahaan

Prudence concept merupakan sarana bagi komisaris independen dalam menjalankan fungsinya. Komisaris independen memerlukan informasi akurat dan

berkualitas dalam pengambilan keputusan dan melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Informasi yang berkualitas bagi komisaris independen yang dikutip dari Ahmed & Duellman (2007) dalam Wardhani (2008) mensyaratkan penggunaan informasi yang lebih konservatif. Sebaliknya, jika pengawasan oleh pihak komisaris independen lemah maka pihak manajemen akan menggunakan prinsip akuntansi yang kurang konservatif. Hipotesis keempat yang akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H₄: Komisaris Independen memperkuat pengaruh *prudence concept* terhadap nilai ekuitas perusahaan.

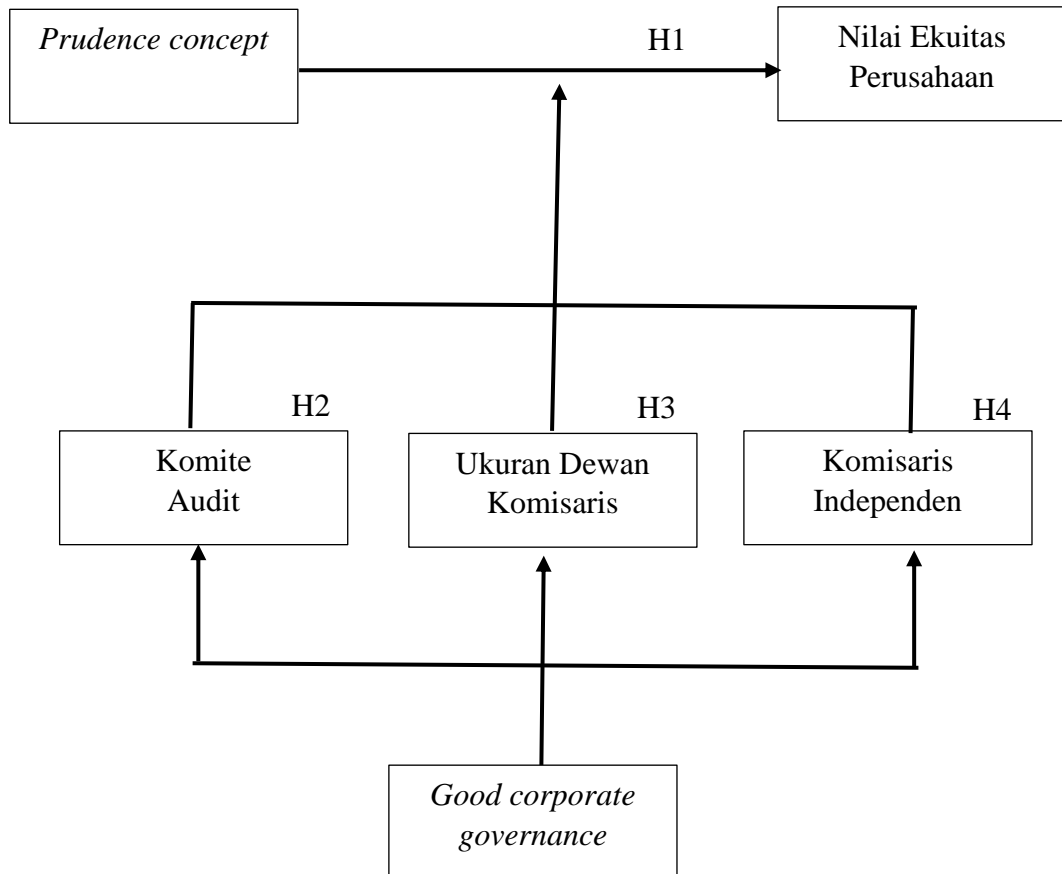
2.9 Rerangka Teoritis



Gambar 1. Rerangka Teoritis

Sumber: Data diolah, 2021

2.10 Desain Penelitian



Gambar 2. Desain Penelitian

Sumber: Data diolah, 2021

